



# AKUNTANSI DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA KECIL ORANG PRIBADI

Azhari S\*  
Devi Safitri

Universitas Riau

\* Email: [devisafitri@lecturer.unri.ac.id](mailto:devisafitri@lecturer.unri.ac.id)

### ABSTRACT

*This study examines the relationship of taxpayer compliance represented by the modernization of the tax administration system, tax sanction, understanding tax regulations and level of education. This research is a survey of peneltian by spreading the questionnaires and the data used is primary data. The population of this research is taxpayers of small-scale private entrepreneurs in KPP Pratama Pekanbaru Senapelan with a turnover of less than 4,800,000,000 per year. This research was conducted in 2019. The sample selection using the method of simple random sampling and the sample size is calculated by using the formula Slovin so obtained 100 respondents. The data analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis by finding that partially modernizing of the tax administration system, taxation sanctions, understanding taxation regulations and level of education have a significant effect on tax compliance of small-scale private entrepreneurs in KPP Pratama the Pekanbaru Senapelan KPP.*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 30 Oktober 2019  
Direview: 25 November 2019  
Disetujui: 16 Maret 2020  
Terbit: 30 April 2020

**Keyword:**  
*compliance of the taxpayer, modernization of the tax administration system, tax sanction, understanding tax regulations and the level of education*

### PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar APBN salah satunya dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa adanya kontraprestasi dari negara yang langsung, diperuntukkan kepentingan umum demi kesejahteraan bersama. Sebagian besar kegiatan negara bersumber dari dana pajak yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Reformasi sistem perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 membawa perubahan yang cukup besar dalam sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menggunakan *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assesment system* yaitu memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang – undangan berlaku. Jadi, sukses atau gagalnya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar ditentukan pada wajib pajak itu sendiri (Resmi, 2019). Dalam penerapan *Self assessment system* ini dituntut kesadaran dan keaktifan wajib pajak untuk mau membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela ini merupakan kunci utama dari *self assessment system*. Sehingga kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan masalah terwujudnya penerimaan dari sektor pajak. *Tax compliance* merupakan perilaku setiap wajib pajak yang mau melaksanakan aturan perpajakan yang ada.

*Self assessment system* diduga dapat menimbulkan ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perpajakannya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kealpaan, unsur sengaja atau ketidakpahaman seseorang mengenai peraturan perundang – undangan perpajakan. Penerapan sistem ini dibutuhkan kejujuran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi, salah satu upaya yang diperlukan dalam mencapai penerapan sistem tersebut agar berjalan efektif adalah dengan penegakan hukum seperti tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Menurut Tiraada (2013:1002), kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diharapkan secara sukarela dalam rangka memberikan sumbangan bagi pembangunan negara. Menurut Pitaloka, *et al* (2018:46), kepatuhan berarti patuh atau taat kepada aturan. Hal ini dapat diartikan dalam perpajakan adalah kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan aturan perpajakan yang ada. Sehingga wajib pajak dikatakan patuh adalah kepatuhan dalam memenuhi dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dari aturan dan hukum pajak.

Masalah kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara tidak langsung mengarah pada upaya untuk menghindari pajak, yang mengarah pada pengurangan penerimaan pendapatan pajak. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran dalam memperhitungkan, ketepatan waktu menyetor, serta mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan pajak, diharapkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya juga tinggi (Rahayu, 2017:20).

Kepatuhan dapat diukur dari ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun materil. Seperti ketepatan waktu membayar pajak, apabila seorang wajib pajak sering menunda pembayaran pajak maka wajib pajak tersebut dikatakan tidak patuh. Pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari kepatuhan dalam memperoleh NPWP, ketepatan dalam memperhitungkan pajak, tepat waktu dalam membayar pajak, tepat waktu melaporkan SPT dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembayaran dan pelaporan SPT. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak datang dari kesadaran wajib sendiri (sukarela). Wajib pajak patuh tidak sama dengan besarnya jumlah pajak yang dibayar, akan tetapi wajib pajak memahami serta patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kriteria tertentu (Kakunsi, *et al.*, 2017).

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018, yang meliputi total penerimaan pajak di Indonesia, maka dicapai target, realisasi penerimaan pajak selama enam tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Periode 2013-2018**  
**(dalam triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,67%	92,24%

Sumber: LAKIN DJP, 2018

Berdasarkan Tabel 1 diatas, capaian persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2013 s/d 2016 mengalami penurunan, artinya Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak selama empat tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam APBN yang dapat digunakan sebagai sumber belanja sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun tahun 2017 s/d 2018 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan persentase capaian periode di tahun sebelumnya. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini adalah yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Salah satu penerimaan negara bersumber dari usaha kecil. Bagian terpenting dari salah satu perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara adalah dari usaha kecil. Usaha kecil sangat berperan penting saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 dan dianggap mambantu dalam proses perekonomian nasional, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja. Pengusaha dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan orang pribadi atau badan dalam bentuk

apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Batasan pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 dijelaskan orang pribadi atau badan memiliki omzet brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 per satu tahun pajak.

Untuk meningkatkan pendapatan negara disektor perpajakan yaitu dari pelaku pengusaha kecil, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berlaku efektif per 1 Juli 2018 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang sebelumnya tarif Pajak Penghasilan Final 1%, sekarang turun 0,5% untuk pengusaha kecil dengan omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 per tahun, diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut kegiatan ekonomi formal yang kedepannya memberikan keadilan dan kemudahan memenuhi kewajiban pajak bagi pengusaha kecil. Selain itu, pengusaha kecil menanggung beban pajak yang lebih rendah, sehingga pengusaha kecil mempunyai kemampuan ekonomi untuk berkembang dan berinvestasi yang lebih pesat.

Pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pengusaha kecil, seiring masih rendahnya sumbangan dari sektor tersebut walaupun secara kuantitas pengusaha kecil di Indonesia sangat besar. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menjelaskan bahwa sumbangan penerimaan pajak Tahun 2018 dari pelaku pengusaha kecil berkisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan negara dari sector perpajakan secara nasional yang sudah mencapai sebesar Rp1.500 triliun. Pemerintah memastikan akan terus mendorong pengusaha kecil melalui berbagai cara. Contohnya dana bergulir dari Kementerian Koperasi, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Sukarno, 2019, 2 Mei).

Kriteria yang ditetapkan dalam menilai wajib pajak yang patuh tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh sesuai dengan peraturan menteri keuangan tersebut. Ketepatan waktu dalam melaporkan SPT dalam 3 tahun terakhir merupakan salah satu kriteria wajib pajak yang dikatakan patuh. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2017 mencatat 3.059 pengusaha kecil orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak wajib lapor SPT, namun demikian terdapat 2.141 pengusaha kecil yang lapor SPT Tahunan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan sekitar 69,99%. Kemudian tahun 2008, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mencatat hanya sebesar 3.172 pengusaha kecil yang lapor SPT Tahunan dari 4.548 pengusaha kecil orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak wajib lapor SPT. Hal ini membuktikan tingkat kepatuhan sebesar 69,74%. Berdasarkan data didapatkan dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tersebut diketahui tingkat kepatuhan dari pengusaha kecil orang pribadi yang melaksanakan usaha tersebut menunjukkan penurunan di tahun 2018 dibanding tahun 2017 walaupun jumlah pengusaha kecil yang terdaftar menunjukkan semakin besar.

Faktor yang menyebabkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di setiap daerah atau wilayah tidaklah sama. Dengan demikian, penting diteliti kembali faktor penyebab kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi masih rendah. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diwakilkan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat pendidikan.

Menurut Rahayu & Lingga (2009:124), modernisasi perpajakan memiliki konsep yaitu pelayanan yang prima dan adanya pengawasan intensif dengan penerapan *good governance*. Tujuan dari modernisasi termasuk peningkatan kepatuhan, mempercayai sistem administrasi perpajakan dan mendorong produktivitas yang tinggi bagi pegawai pajak. Tiga hal dalam modernisasi itu sendiri antara lain: reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Berhasil atau tidaknya modernisasi perpajakan memerlukan keterlibatan dan ketulusan hati baik semua pihak. Menurut Sarunan (2015:519), penggunaan *online payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, dan sistem informasi DJP merupakan bentuk penerapan modernisasi teknologi informasi pelayanan dan kemudahan perpajakan. Disamping itu, pihak DJP telah menerapkan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran membayar

pajak, peningkatan database dan *single identification number* dan cara - cara lain yang telah terus ditingkatkan dan dimutakhirkan.

Menurut Sarunan (2015:519), modernisasi sistem administrasi yang dilakukan oleh DJP bertujuan untuk mendorong program transparansi dan keterbukaan sehingga dapat mengantisipasi timbulnya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Diharapkan modernisasi ini sejalan dengan peningkatan kepatuhan sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi kepatuhan dari wajib pajak untuk memperoleh NPWP, membayar dan menyampaikan pajak, serta kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

Sanksi perpajakan dalam Mardiasmo (2018:62) menjelaskan adanya jaminan bahwa wajib pajak akan mentaati seluruh aturan pajak atau alat *preventif* supaya patuh akan aturan di bidang pajak. Dengan adanya peraturan yang berlaku akan menjadi petunjuk bagi setiap orang untuk bertindak sesuatu tentang yang dilaksanakan dan yang dilarang. Handayani & Damayanti (2018) menyatakan bahwa tindakan dan peraturan memuat hak dan kewajiban, serta tindakan yang diperbolehkan. Tindakan dan aturan yang berlaku harus mengandung sanksi kepada setiap orang yang melanggar agar masyarakat mematuhi aturan tersebut. Tidak terkecuali hukum pajak. Tujuan sanksi pajak untuk mencegah wajib pajak mengabaikan kewajiban pajak mereka. Ada dua bentuk sanksi pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Tingkat pemahaman dalam Prajogo & Widuri (2013) merupakan cara seseorang meningkatkan pengetahuannya secara mendalam dan seberapa besar ia mampu memahami dengan baik permasalahan yang ingin diselesaikan. Dari pemerintah sendiri, faktor yang berpotensi menumbuhkan kepatuhan dari wajib pajak yaitu kualitas pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan. Apabila seseorang mampu menyelesaikan sesuatu secara baik maka orang tersebut mempunyai tingkat pemahaman yang baik pula. Agar terlepas dari segala sanksi pajak, seharusnya wajib pajak memahami peraturan dan melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman tentang aturan perpajakan tentunya seseorang akan patuh dan sadar dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Kakunsi, *et al.* (2017:394) tingkat pendidikan merupakan tingkat pertumbuhan anggota asuh, maksud yang diraih dan keinginan yang luas. Adanya perubahan perilaku dan gaya hidup sehat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Apabila dikaitkan dengan pajak, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang tentunya akan mempermudah dalam menerima informasi mengenai undang – undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya dan kemudian menjalankannya serta mematuhi agar terhindar dari sanksi pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas masih terdapat inkonsistensi. Penelitian ini mengacu dari Sarunan (2015) dan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis menambahkan sanksi perpajakan merujuk pada penelitian Aini & Fidiana (2017), variabel pemahaman peraturan perpajakan yang merujuk pada penelitian Ananda, *et al.* (2015), dan variabel tingkat pendidikan yang merujuk pada penelitian Kakunsi, *et al.* (2017). Lokasi penelitianpun berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu di KPP Pratama Manado, sedangkan penulis ingin meneliti di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berada di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru, Riau.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Atribusi ( *Atribution Theory* )

Teori ini mengemukakan bagaimana orang mencoba mempelajari tingkah laku orang lain dan menyimpulkan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal (Robbins, 2002 dalam Arifah *et al.*, 2017). Teori atribusi ini mempunyai kaitan dengan sikap wajib pajak, kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang merupakan faktor internal sehingga seseorang dapat menarik kesimpulannya. Atau dengan kata lain sikap dan perilaku wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing – masing individu.

### Teori Perilaku Yang Direncanakan ( *Theory of Planned Behavior* )

Teori perilaku yang direncanakan mengemukakan tindakan seseorang timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Model TPB dalam (Ajzen, 1991) menjelaskan tindakan seseorang dipengaruhi oleh tiga macam kepercayaan, yaitu (a) kepercayaan perilaku yaitu kepercayaan orang mengenai

kemungkinan terjadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif yaitu kepercayaan mengenai ekspektasi normatif dari orang lain dan dorongan untuk menyetujui ekspektasi tersebut, (c) kepercayaan kontrol yaitu kepercayaan tentang eksistensi faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut.

Hambatan muncul ketika perilaku ditunjukkan bisa bersumber internal atau eksternal seseorang. Apabila dilihat keseluruhan, kepercayaan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku disukai atau tidak disukai, kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif dan kepercayaan kontrol menghasilkan kontrol keperilakuan dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku secara bersama - sama akan menimbulkan niat perilaku dan kemudian terbentuk perilaku.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Modernisasi sistem administrasi perpajakan salah satu faktor diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yang disempurnakan dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih guna menaikkan kualitas pelayanan masyarakat dengan harapan menaikkan kepatuhan dari wajib pajak dan penerimaan negara. Contoh pelayanan *e-system* dari modernisasi sistem administrasi perpajakan antara lain *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Banking*, *e-Billing* yang akan mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015), Rusli (2016), dan Aini & Fidiana (2017) memberikan temuan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh Arifah, *et al.* (2017) menemukan sistem administrasi perpajakan yang modern tidak berhubungan pada kepatuhan wajib pajak dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Dengan dikeluarkannya undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 16 Tahun 2009) sukses mengeluarkan aturan – aturan baru mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus. Ditetapkannya aturan atau ketentuan tersebut agar mengurangi pelanggaran hukum yang dilakukan wajib pajak maupun fiskus. Untuk mendorong wajib pajak mau membayar pajak, dibutuhkan penegakan hukum yang adil oleh aparat pajak. Dengan demikian, ketegasan sanksi perpajakan sangat penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan tentunya akan mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hasil penelitian Aini & Fidiana (2017), Dewi & Setiawan (2017), Susmita & Supadmi (2016), Husnurrosyidah (2016), dan Arifah *et al.* (2017) yang menemukan sanksi perpajakan juga berhubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) yang hasilnya sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Menurut Adiasa (2013:346), kepatuhan wajib pajak diukur dari pemahaman atas ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dalam melengkapi formulir yang lengkap dan jelas, benar dalam menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan menyampaikan pajak terutang tepat waktu. Berhasilnya pemenuhan kewajiban perpajakan jika wajib pajak paham dengan baik tentang aturan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang tidak patuh diduga tidak paham secara jelas aturan mengenai pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku maka semakin besar kemungkinan kepatuhan dari wajib pajak tersebut, khususnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013), Prajogo & Widuri (2013), dan Ananda, *et al.* (2015) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda pula hasil Andinata (2015), Faizin, *et al.* (2016), dan Arisandy (2017) menemukan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan

wajib pajak dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak.**

Tingkat pendidikan masyarakat yang terus meningkat diduga mempengaruhi kemampuan masyarakat tersebut untuk memahami lebih cepat mengenai aturan perpajakan dengan baik dan mengimplementasikannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun rendahnya jenjang pendidikan akan mendorong masyarakat enggan memenuhi kewajibannya dikarenakan minimnya kesadaran dan kurang paham terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, tingginya tingkat pendidikan masyarakat, akan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Wulandari & Suyanto, 2014:96). Bila dihubungkan dengan pembayaran pajak, sudah semestinya jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi, kesadaran membayar pajak akan menjadi tinggi juga dibandingkan yang berpendidikan rendah. Untuk wajib pajak yang berpendidikan tinggi tentunya lebih paham arti pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dalam hasil penelitian Rusli (2016) dan Kakunsi *et al.* (2017) yang berhasil membuktikan bahwa tingkat pendidikan juga berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya Wulandari & Suyanto (2014) dimana hasil penelitiannya tingkat pendidikan belum terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## METODOLOGI PENELITIAN

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian merupakan penelitian *survey* dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dimana jawaban setiap pernyataan merupakan data primer. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang terdaftar sampai tahun 2018 sebesar 5.003 orang. Populasi tersebut kemudian dijadikan sampel menggunakan metode *simple random sampling* dan ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin sehingga didapat 100 responden. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2019. Kemudian pengukuran variabel menggunakan skala *Likert* yang terdiri 5 pilihan jawaban yaitu SS = skor 5, S = skor 4, N = skor 3, TS = skor 2, STS = skor 1. Berikut ini disajikan tabel pengukuran variabel yaitu:

**Tabel 2**  
**Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	Kuesioner
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patuh mendaftarkan diri memperoleh NPWP</li> <li>Benar menghitung dan memperhitungkan pajak</li> <li>Tepat waktu menyetor pajak</li> <li>Tepat waktu menyampaikan SPT</li> <li>Patuh membayar tunggakan pajak beserta bunganya (Rahmanto, 2015)</li> </ul>	11 pernyataan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Administrasi</li> <li>Efektivitas Pengawasan</li> <li>Sumber Daya Manusia Profesional (Khasanah &amp; Y, 2016)</li> </ul>	10 pernyataan
Sanksi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi pidana</li> <li>Sanksi administrasi</li> <li>Sanksi berat membuat wajib pajak patuh</li> <li>Sanksi kepada pelanggar tanpa toleransi</li> <li>Sanksi pajak dapat dinegosiasikan sesuai aturan yang berlaku (Suhendri, 2015)</li> </ul>	9 pernyataan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku</li> <li>Mengetahui batas waktu pelaporan SPT</li> <li>Mengetahui fungsi NPWP</li> <li>Mengetahui fungsi pajak</li> </ul>	7 pernyataan

Variabel	Indikator	Kuesioner
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami sistem perpajakan saat ini</li> <li>Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai (Rahmanto, 2015)</li> </ul>	
Tingkat Pendidikan (X4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan fungsi pajak yang dibayar</li> <li>Mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku</li> <li>Mengerti cara menghitung pajak</li> <li>Mengetahui ketentuan-ketentuan sanksi perpajakan yang berlaku</li> <li>Mengerti mekanisme membayar pajak (Asih, 2016)</li> </ul>	5 pernyataan

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linier regresion analysis*) dengan bantuan SPSS versi 21. Metode analisis data diterapkan melalui beberapa tahapan yaitu: 1) analisis statistik deskriptif, 2) pengujian instrumen data yang terdiri dari uji validitas data dengan syarat jika nilai  $r_{hitung}$  lebih dari  $r_{tabel}$  maka item - item pernyataan variabel tersebut adalah valid dan uji reliabilitas data dengan syarat nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70 maka dinyatakan reliabel, 3) uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05, 4) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*, apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji multikolinearilitas dapat dilihat pada angka *collinearity statistics* yang ditampilkan oleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*, apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas artinya model regresi tersebut baik, 5) uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilihat dari *Adjusted R Square*, dan 6) pengujian hipotesis menggunakan uji t, apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih dari  $t_{tabel}$  atau nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018:19).

**Tabel 3**

#### Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	23	51	37,43	4,606
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	100	27	46	34,15	3,170
Sanksi Perpajakan (X2)	100	21	42	32,16	3,592
Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3)	100	20	33	24,99	3,855
Tingkat Pendidikan (X4)	100	11	24	15,14	2,433
Valid N (listwise)	100				

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena setiap variabel mempunyai angka rata-rata (*mean*) lebih besar dari angka standar deviasinya.

### Hasil Uji Validitas Data

Tujuan uji validitas data menurut Ghozali (2018:51) adalah untuk menilai valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila item pertanyaan dalam kuesioner sanggup menjawab suatu hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data, semua nilai  $r_{hitung}$  untuk keseluruhan pernyataan masing-masing variabel penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak,

modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat pendidikan menyimpulkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,1966). Artinya bahwa semua item pernyataan setiap variabel adalah sah atau valid digunakan sebagai data penelitian.

### Hasil Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas data dalam Ghazali (2018:45) merupakan instrumen dalam menguji item pertanyaan yang merupakan paramater dari variabel atau konstruk. Semua item pertanyaan dianggap handal (*reliable*) jika responden menjawab pertanyaan dengan konsistensi di sepanjang waktu. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui angka *Cronbach's Alpha* untuk masing – masing variabel penelitian melebihi dari nilai kritisnya yaitu 0,7. Artinya bahwa semua item pernyataan setiap variabel adalah reliabel dan dianggap dapat mengukur secara konsisten.

### Hasil Uji Normalitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Salah satu teknik yang peneliti gunakan yaitu uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* dari seluruh variabel penelitian diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,778 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut berdistribusi normal.

### Hasil Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai koefisien determinasi dapat diketahui dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,485 (48,5%). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keseluruhan variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen sebesar 48,5%, sisanya 51,5% dipengaruhi variabel lain dan tidak dimasukkan kedalam model regresi ini.

### Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi linear berganda untuk mendapatkan gambaran menyeluruh pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam menguji hipotesis menggunakan uji t yang didapatkan dari model regresi berganda. Berikut hasil pengolahan datanya :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Model	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.	Hipotesis
(Constant)	-0.272	1,985	0,786	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	2,288	1,985	0,024	Diterima
Sanksi Perpajakan (X2)	4,038	1,985	0,000	Diterima
Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3)	2,560	1,985	0,012	Diterima
Tingkat Pendidikan (X4)	2,034	1,985	0,045	Diterima

## PEMBAHASAN

Tabel 4 diketahui hipotesis pertama diterima bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dari data penelitian, secara keseluruhan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah menerapkan sistem modernisasi administrasi perpajakan secara baik, namun dari beberapa jawaban responden perlu ditingkatkan lagi sosialisasi atau penyuluhan mengenai aturan perpajakan yang terbaru. Hasil temuan ini didukung oleh Sarunan (2015), Rusli (2016), dan Aini & Fidiana (2017) menemukan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun temuan tidak sejalan dengan Rahayu & Lingga (2009), dan Arifah, *et al.* (2017) yang hasilnya bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4 didapatkan hipotesis kedua diterima bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dikenakan dengan maksud wajib pajak khawatir



melawan undang-undang perpajakan. Untuk mematuhi hukum dan aturan ini, pelanggaran patut dihukum. Jadi, peningkatan kepatuhan dari wajib pajak harus ada sanksi pajak yang jelas menurut pelanggaran yang diperbuat dengan harapan menghasilkan efek jera sehingga si wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Dewi & Setiawan (2017), Husnurosyidah (2016), dan Arifah, *et al.* (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya Winerungan (2013) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.

Hipotesis ketiga hasil penelitian ini diterima bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak. Berarti pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak untuk melakukan segala aturan pajak yang berlaku. Apabila wajib pajak paham dalam menghitung dan menyetor besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, serta menyampaikan dalam Surat Pemberitahuan, maka tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau pun Surat Tagihan Pajak. Jika tingkat pemahaman perpajakan si wajib pajak baik tentunya mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik pula, sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. Temuan ini mendukung penelitian dari Prajogo & Widuri (2013), dan Ananda, *et al.* (2015) yang berhasil membuktikan pemahaman tentang peraturan perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya Andinata (2015), dan Faizin, *et al.* (2016), dan Arisandy (2017) menunjukkan hasil pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat hasil penelitian ini diterima bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan mempengaruhi perkembangan sikap dan gaya hidup sehat. Apabila dikaitkan dengan pajak, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang tentunya akan mempermudah dalam menerima informasi mengenai undang – undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya dan kemudian menjalankannya serta mematuhi agar terhindar dari sanksi pajak. Dari hasil penelitian, wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan rata – rata memiliki jenjang pendidikan tingkat SMA dan S1. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan paham dalam menerima informasi dan melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung dari Kakunsi, *et al.* (2017) berhasil membuktikan tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Namun lain halnya Wulandari (2014) hasilnya bahwa tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Dari hasil pengujian serta analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat pendidikan secara individu mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah sebaiknya wajib pajak memahami dan memanfaatkan pembaharuan teknologi dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dalam mendaftarkan diri memperoleh NPWP, membayar dan melaporkan pajak. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pajak, wajib pajak dapat mengikuti pelatihan brevet pajak A, B dan C dan untuk pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasinya mengenai aturan terbaru perpajakan dan sanksi pajak bagi pengusaha kecil agar wajib pajak paham, mengerti, dan terlepas dari sanksi pajak.

## REFERENSI

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i3.2848>
- Aini, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan

Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–19.

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3), 1–15.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71. <https://doi.org/10.31849/jieb.v14i1.871>
- Asih, E. (2016). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga). *Skripsi. Universitas Satya Negara Indonesia*.
- Dewi, N. L. P. D. S. P., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 1821–1847. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p05>
- Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, O., & Damayanti, T. W. (2018). Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.33312/ijar.332>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–143.
- Husnurrosyidah. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–226. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i2.1947>
- Kakunsi, E., Pengemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 391–400.
- Khasanah, S. N., & Y, A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita, Edisi 8*, 1–13.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh ). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pitaloka, L. K., Kardoyo, & Rusdarti. (2018). The Socialization of Tax as a Moderation Variable Towards the Taxpayer Compliance of Industrial Performer in Kudus Regency. *Journal of Economic Education*, 7(1), 45–51. <https://doi.org/10.15294/jeec.v7i1.24059>
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak,

- Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.21>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Rahmanto, B. W. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusli, Y. M. (2016). Tax Compliance yang Dianteseden oleh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis-EKONOMIS*, 10(1), 13–29.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–29.
- Sukarno, P. A. (2019). *Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(3), 999–1006.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94–102. <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>